

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan Pengembangan Partisipasi Politik Warga Negara

Dede Darkam

STKIP Muhammadiyah Kuningan
Pos-el: dededarkam@yahoo.co.id

Abstrak

Komisi pemilihan umum Kabupaten Majalengka dan pengembangan partisipasi politik warga negara; Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara sangat penting. Rendahnya kualitas partisipasi politik warga negara di Kabupaten Majalengka belum bisa di kategorikan bagus dengan berkualitas data temuan ngungkapkan bahwa partisipasi yang terjadi diakibatkan oleh pengaruh orang lain sehingga tidak menumbuhkan pilihan rasional, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 10 ayat 3 huruf (r) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat adalah Sosialisasi di mana isinya merupakan proses memperkenalkan nilai-nilai pemilu kepada warga negara agar warga negara memiliki persepsi, tanggapan dan sikap politik terhadap wacana politik yang sedang terjadi, dan partisipasi itu memiliki implikasi yang tinggi dalam masyarakat yaitu untuk meningkatkan kemelek politikan warga negara.

Kata kunci : *Komisi pemilihan umum, partisipasi politik, pilihan rasional, pemilu yang berkualitas*

Abstract

The Role Socialization Election Commission Elections and Political Implication to Development of Citizen Participation. Law No. 22 Year 2007 regarding General Election in article 10, paragraph 3 (r) states that the Regency/ city in the administration of elections Head and Deputy Head of regional and/or related to the duties Regency/City KPU to the public. Socialization is the process of election to introduce the values of the election to the citizens so that citizens have a perception, response and political attitudes toward the current political discourse in the country, in addition to the high socialization have implications in the society is to increase the political literacy of citizens

Pendahuluan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dalam ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian pemilu yang *luber dan jurdil* adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Kabupaten Majalengka dalam sistem politik demokrasi.

Hubungannya dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten terdapat dalam pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Jika melihat tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota di atas dalam hal pemilihan kepala daerah adalah mensosialisasikan pemilu kepala daerah kepada warga negara dengan tujuan agar warga negara memiliki pengetahuan pemilu secara holistik. Sosialisasi pemilu bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai pemilu kepada warga negara agar bisa menyikapi pemilu yang diimbangi dengan pengetahuan, dengan demikian sosialisasi pemilu kepala daerah memiliki peranan yang berarti bagi warga negara disamping sebagai proses pemberdayaan pengetahuan politik pemilu juga sebagai penyeimbang antara modernisasi Undang-Undang pemilu dengan pengetahuan politik warga negara.

Akan tetapi sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota berhadapan dengan budaya politik warga negara, di mana budaya politik warga negara tersebut merupakan cerminan dari sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagianya, dengan demikian budaya politik warga negara merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial dengan melalui proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat *kognitif* (pengetahuan

dan keyakinan), afektif (ikatan emosional atau perasaan) dan *evaluatif* (penilaian).

Kaitan sosialisasi pemilu dengan partisipasi politik warga negara merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan, partisipasi politik muncul bisa jadi karena ada sosialisasi yang bagus sehingga warga negara mendapatkan pemahaman akan pengetahuan politiknya (*political knowledge*) yang di kemudian hari akan dijadikan referensi untuk melakukan partisipasi politik. Oleh karena salah satu karakteristik yang menandai sistem politik demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang berkualitas yaitu dengan melakukan pemberian suara secara cerdas dan bertanggung jawab oleh warga negaranya dalam suatu pemilihan kepala daerah.

Kondisi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Majalengka tidak mencerminkan sebagai mana yang diutarakan di atas atau dengan kata lain bertolak belakang dimana kondisi warga negara tidak bisa melakukan partisipasi politik yang berkualitas atau dengan cerdas yang bertanggungjawab itu dikarenakan situasi warga negara yang merupakan *voter* mayoritas belum paham akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara yang sesungguhnya hal ini kemudian di tambah dengan kurangnya (*political knowledge*) dari warga negara sendiri dan implikasi dari situasi seperti ini menjadikan pilihan politik warga negara dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal (pengaruh orang lain lebih kuat) dalam memutuskan pilihan politiknya.

Voting merupakan bagian terendah dari bentuk partisipasi politik warga negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (1986:124) dimana dia membagi tingkatan partisipasi politik sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administrative
2. Mencari jabatan politik atau administrative
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informasi minat umum dalam politik
9. *Voting* (pemberian suara)

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang

dikemukakan oleh Bogdan dan Bikken (1982:28) "*Qualitative researchers are concerned with proses rather than simply with outcomes or product*" kaitanya dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti bermaksud mencari penekanan yang mendalam dalam mengungkap data yang ditemukan di KPU Kabupaten Majalengka dalam melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah. Lincoln dan Guba (1987: 37) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif tidak akan lepas dari paradigma dan paradigma yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah paradigma naturalistik.

Pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh peneliti bermaksud agar dalam proses penelitian peneliti memiliki mendapatkan keleluasaan dan kelapangan ruang gerak dalam menelusuri dan merambah berbagai aspek sosialisasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten tanpa dibebani kekhawatiran akan terjebak kedalam kepicikan etnosentrisme, prasangka subyektif ataupun paham profesionalisme sempit lainnya. Adapun tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif dalam mengungkap data tentang peranan sosialisasi pemilu dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majalengka agar bisa terungkap data sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk memperoleh data tentang gambaran yang mendalam dan holistik tentang bagaimana peranan KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (2) Untuk memperoleh data bagaimana mekanisme KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala daerah. (3) Untuk memperoleh data bahwa sosialisasi pemilihan kepala daerah oleh KPU Kabupaten Majalengka ada kaitanya dengan pengembangan partisipasi politik warga negara.

Metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah metode studi kasus sebagaimana yang diungkapkan oleh Sevilla (1988); Nasution (1995); Yin, (1996) bahwa studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam, terinci dan menyeluruh bahkan. Creswell (2012:465) mengungkapkan bahwa studi kasus adalah *A case study is an in-dept exploration of a bounded system (e.g., activity, event, process, or individual) based on extensive data collection (Creswell, 2007). Bounded means that the case is separated our research in term, place, or some physical boundaries.*

Peneliti ingin mengeksplorasi data di KPU Kabupaten Majalengka yang berkaitan dengan sosialisasi pemilihan kepala daerah yang mendalam tentang sistem yang dibatasi dalam hal aktivitas, peristiwa, proses atau individu-individu dengan berbasis pengumpulan data yang ekstensif.

KPU Kabupaten Majalengka dan Pengembangan Partisipasi Politik

Langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Majalengka dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara dengan berbagai cara seperti: sosialisasi kepada *stake holder* Kabupaten, sosialisasi kepada partai politik, sosialisasi kepada tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (toma), sosialisasi di tempat umum (mall dan pasar), kerja sama dengan dinas pendidikan khusus untuk pemilih pemula, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi melalui radio daerah dan radio swasta, memasang (spanduk, baligo, brosur, liflet, pamflet).

Ditemukan data KPU Kabupaten Majalengka belum maksimal dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara hal ini bisa terindikasikan dari respons warga negara dalam melakukan pilihan politik rasional pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten, di mana secara keseluruhan partisipasi politik warga negara sudah baik akan tetapi partisipasi yang baik tidak sejalan dengan kulaitas pilihan rasional disebabkan warga negara belum bisa memahami secara holistik makna pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan pilihan politik yang bertanggung jawab.

Partisipasi politik warga negara dalam pemilihan kepala daerah adalah *voting*, *voting* dan Komisi Pemilihan Umum memiliki hubungan *simbiosismutualisme* oleh karena itu *voting* inilah yang paling realistis dalam bentuk hirarki partisipasi politik dimana *voting* merupakan partisipasi politik yang paling rendah dari sekian hirarki yang disampaikan oleh Rush dan Althoff (1986). Pemanfaatan media dan kemitraan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majalengka tidak mengarahkan kepada kualitas dari proses pilihan politik dalam bentuk *voting* di mana bentuk pilihan yang dilakukannya oleh warga negara tidak mencerminkan pilihan yang berdasarkan (*political knowledge*) secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Majalengka belum bisa diserap oleh mayoritas warga negara hal ini berimplikasi terhadap sikap politik warga negara di mana partisipasi politik warga negara tinggi akan tetapi itu masih di pengaruh orang lain sehingga berdampak pada tidak dimilikinya sikap politik yang otonom dengan pilihan rasionalnya. Oleh karena idealnya implikasi dari proses sosialisasi adalah meningkatnya kualitas pilihan warga masyarakat atas dasar sikap politik warga masyarakat yang *confident*, *competent* dan *commitment*.

Oleh karena itu penumbuhan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya membutuhkan waktu lama dan harus terus dilaksanakan dengan mekanisme yang baik dan terencana sebagai wujud dari rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Maka KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan program tersebut dalam rangka melakukan sosialisasi politik agar warga masyarakat menjadi pintar dan

cerdas dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara.

Agen-agen yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Majalengka untuk memberikan pendidikan politik warga negara dalam memberikan pilihan politiknya belum bisa bekerja secara maksimal dalam rangka menumbuhkan partisipasi politik warga negara yang berkualitas tersebut, warga negara masih tetap menggunakan pilihan politiknya bukan atas dasar pilihan politik rasional yang bertanggung jawab akan tetapi pengaruh eksternal (orang lain) masih dominan dan kuat dalam kehidupan budaya politik warga negara di Kabupaten Majalengka.

Kegiatan penyadaran masyarakat tersebut dalam bentuk sosialisasi pemilu untuk meningkatkan kualitas partisipasi warga negara yang bertanggung jawab dapat digolongkan sebagai wujud dari pengembangan demokrasi yang partisipatif, oleh karena demokrasi tidak akan eksis dan tegak jika warga masyarakat sendiri tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban dengan demikian maka, KPU dan warga masyarakat harus saling menopang.

Simpulan

1. Peran KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berperan sebagai pelaksana pemilu yang disesuaikan pada tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kemampuan pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan seminar dan lokakarya pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pendidikan pemilih (*voter education*) pemula, pemanfaatan media (cetak dan elektronik), pemasangan (baligo, spanduk dan pamflet) di tempat-tempat strategis dan pembentukan tim penggerak pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara ini bisa terindikasikan dari respon warga negara dalam gema dan kesemarakannya pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten, di mana secara keseluruhan warga negara belum bisa memahami secara holistik makna pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdampak pada rendahnya kualitas pemilu.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A. Chaedar. (2008). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya

- Bogdan, Robbert, C. Dan Biklen, SK. (1982). *Qualitative Reseach for Education and Introduction to Theory and Methods*. Boston Allyn and Bacon. Inc.
- Budiamnsyah, D dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKn SPS UPI.
- Budiarjo, Miriam. (2000). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, Robert. (1992). *Demokrasi dan Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Deverger, Maurice. (2005). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Diamond, Larry. (1994). *Revolusi Demokrasi, Perjuangan Untuk Keabsahan dan Pluralitas di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dirdjosanjata, P dan Kana, Nico, L. (2006). *Demokrasi dan Potret Pemilu 2004*. Yogyakarta: Percik dan Pustaka Pelajar
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Jamil (2005). *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES
- Haynes, Jeff. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia
- Huntington, Samuel dan Nelson, Joan, M. (1984). *Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Sangkala Pulsa
- Huntington, Samuel. (2004). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik dunia. (The Clas of Civilization and The Remaking of World Order*. Yogyakarta: Kalam
- Huntington, Samuel. (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berkembang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lakof, Sanford. (1996), *Democracy*. Amerika Serikat: Wertervi Press
- Lincoln, Yviona dan Guba, Egon, G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publications
- Lipset, S. Martin. (2007). *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Markoff, John. (2002). *Wafes of Democracy, Social Movement and Political Change*. Yogyakarta: Puastaka Pelajar
- Nasution. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Pujman, Louis. (2002). *Global Political Philosophy*. New York: Mc. Graw Hill
- Sherman, K. Arnold dan Kolker, A. (1987). *The Social Bases of Politic*. California: MelmontTocqueville, Alexis De. (2006) *Tentang Revolusi Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*